

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan penjelasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa :

1. Melalui pemahaman terhadap regulasi seperti KUHP, UU ITE, dan regulasi OJK, serta melalui pendekatan represif dan preventif, pengaturan teknologi *blockchain* yang telah dijabarkan. Regulasi tersebut bertujuan untuk menanggulangi kecurangan pembayaran yang melibatkan QRIS dalam transaksi elektronik oleh konsumen. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada dan mempertimbangkan inovasi serta perlindungan konsumen dalam pengembangan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Temuan mengindikasikan adanya variasi pendekatan regulasi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan Singapura. Amerika Serikat memiliki kerangka regulasi yang mapan dengan pengaturan pajak terkait aset kripto oleh IRS, sementara China mengambil pendekatan yang lebih tegas dengan melarang perdagangan mata uang kripto dan mengatur penggunaan *blockchain* dalam sektor tertentu. Di sisi lain, Singapura mendorong inovasi dalam *blockchain* dengan pendekatan progresif yang diawasi oleh MAS. Ini menunjukkan kompleksitas dalam regulasi *blockchain* dan perlunya pengembangan

regulasi yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan konsumen.

## B. Saran

Peningkatan regulasi terkait teknologi *blockchain* dalam transaksi elektronik, terutama QRIS, sangat penting. Pemerintah perlu memperbarui regulasi yang ada untuk mengakomodasi perkembangan teknologi ini guna meningkatkan keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Selain itu, membentuk forum atau badan khusus yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan industri akan membantu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi *blockchain*. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga penting untuk memastikan pemahaman yang memadai bagi regulator, pelaku bisnis, dan masyarakat umum tentang potensi dan risiko teknologi ini. Terakhir, kolaborasi lintas sektor dan lintas lembaga perlu ditingkatkan untuk memperkuat kerangka kerja pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan teknologi *blockchain*, terutama dalam mengatasi kecurangan pembayaran dan melindungi konsumen.